

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah, melalui Bappeda dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, telah berupaya mengidentifikasi, merencanakan, dan mengelola RTH sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan lahan, alih fungsi lahan, konflik administratif, serta kendala teknis terkait dokumen kepemilikan.

Selain itu, tingginya kebutuhan lahan untuk pembangunan ekonomi semakin memperumit pencapaian target luas RTH. Di Kota Yogyakarta, pencapaian ini masih jauh dari harapan. Dengan luas wilayah 3.281,91 hektar, Kota Yogyakarta menghadapi keterbatasan lahan yang signifikan dalam memenuhi target luas RTH Publik (RTHP) sebesar 20% dari total wilayah, yaitu sekitar 6.560.000 m². Terbatasnya lahan yang tersedia untuk RTH, ditambah dengan harga tanah yang tinggi dan pesatnya pembangunan, menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengembangkan solusi inovatif seperti taman vertikal, lorong hijau, dan kolaborasi dengan masyarakat serta sektor swasta. Keberhasilan program ini dapat diukur dari peningkatan luas dan aksesibilitas ruang hijau serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan

hidup. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan sinergis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan pengadaan RTH, termasuk memberikan insentif bagi pemilik lahan. Edukasi dan sosialisasi manfaat RTH harus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Pemanfaatan konsep vertikal dan multifungsi, seperti taman vertikal dan kebun atap, dapat menjadi solusi atas keterbatasan lahan. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui CSR atau kemitraan strategis dapat membantu pendanaan dan pelaksanaan program. Peningkatan kapasitas teknis dan administratif Bappeda serta Dinas Pertanahan juga diperlukan untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan dan dokumen kepemilikan. Dengan langkah-langkah ini, pengadaan RTH di Kota Yogyakarta diharapkan lebih efektif, bermanfaat bagi masyarakat, dan mendukung pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwi Ratna Nurhajarini, 2012, *Yogyakarta: Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Sitanggang, 1996, *Ekologi Pemerintahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Maria S.W Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media Publishing, Jawa Timur.
- Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2012, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Retna Dewi Lestari, dkk, 2022, *Hukum Agraria & Tata Ruang*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37
- Sudjitno dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, TuguJogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung.

JURNAL:

- Anang Zubaidy, 2024, “*Tindakan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dan Kompetensi Pengadilan*”, Universitas Islam Indonesia, hlm.1.
- FX. Sumarja, 2019, “Eksistensi Lembaga Penilai Dalam Pengadaan Tanah, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 No. 2 November 2019*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.211.
- Jarot Widya Muliawan, 2028, “Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition”, *Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018: 163 – 182*, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, hlm.3.
- Ratnia Solihah, 2014, “*Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah*”, Universitas Terbuka, hlm. 4.
- Wildan Fido Ramadhan dan Syifa Aulia Zahra, 2023, “Analisis Urgensi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan di Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal Pendidikan Geosfer Volume VIII Nomor 2 Tahun 2023*, Universitas Negeri Jakarta, hlm.4.

INTERNET:

- Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Hasil Sensus Penduduk 2020 D.I. Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1077>, diakses 6 Oktober 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dokumen IKPLHD 2023, hlm 26, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/slhd>, diakses 6 Oktober 2024.
- Pemerintah Kota Yogyakarta, Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta, <https://www.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum> diakses tanggal 19 Februari 2025.
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, Kondisi Geografis Kota Yogyakarta, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/1069> diakses tanggal 20 November 2024.
- Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Jiwa) 2015, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjM5IzI=/jumlah-rumah-tangga-dan-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-.html>, diakses 20 November 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik